

# EFEKTIVITAS REVISI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

Meilan Claudia Bonai

NPP. 29.1787

*Asdaf Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: meilanbonaiaclaudia@gmail.com

## ABSTRACT (in English)

**Problem/Background (GAP):** (Contains the background behind the research) Yapen Islands Regency based on the decree of the Dprd of the Yapen Islands regency number 180/18 dated December 28, 2019 has settled the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for fiscal year 2020 with details of the amount of regional expenditure for the Yapen Islands Regency in 2020 of Rp.1,333 trillion and regional financing of the Yapen Islands Regency of Rp.218 billion, At the beginning of March 2020, there was a budget revision and cut the budget of each OPD by 20% to accelerate the handling of the COVID-19 Pandemic. **Objectives:** This study aims to determine the effectiveness of the revision of the 2020 REGIONAL BUDGET in accelerating the handling of COVID-19, knowing the supporting and inhibiting factors faced in the revision process of the 2020 Regional Revenue and Expenditure Budget, as well as the efforts made by BPKAD to overcome obstacles in revising the 2020 REGIONAL BUDGET. **Methods:** The method used in this observation is Descriptive Qualitative Research with an Inductive Approach. With data collection techniques through Interviews, Observations, and Documentation. **Results/Findings:** The results showed that the revision of the Regional Revenue and Expenditure Budget in 2020 by the Regional Financial and Asset Management Agency of the Yapen Islands Regency was implemented. Supporting factors for the revision of the Regional Revenue and Expenditure Budget in 2020 include the budget of each Regional Apparatus Organization which is reduced by twenty percent of the budget of the Regional Apparatus Organization and the performance of employees who began to establish a work form home and there was support from each Regional Apparatus Organization to deal with the spread of COVID-19. **Conclusion:.** The hindering factor in the revision of the Regional Revenue and Expenditure Budget in 2020 is that the budget used to purchase consumables by health workers as well as for patient care requires a budget that is still calculated very largely compared to the existing budget and the General Allocation Fund received by local governments from the Province is also lacking. Efforts made by the Regional Management and Assets Agency of the Yapen Islands Regency by revising 3 times The Regional Revenue and Expenditure Budget in 2020 by continuing to reduce the activity budget in each Regional Apparatus Organization.

Keywords: Revised Budget, Regional Revenue and Expenditure Budget

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi *background* yang melatarbelakangi penelitian) Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan surat keputusan DPRD kabupaten Kepulauan Yapen nomor 180/18 tertanggal 28 Desember 2019 sudah menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dengan rincian besaran belanja daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2020 sebesar Rp.1,333 triliun serta pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar Rp.218 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan seperti yang dikatakan ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Yohanes Raubaba ditetapkan sebesar Rp.234,8 miliar sehingga terdapat surplus anggaran daerah sebesar Rp.16 miliar. Pada awal bulan maret tahun 2020 terjadi revisi anggaran dan memotong anggaran setiap OPD sebesar 20% untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas revisi APBD tahun 2020 dalam percepatan penanganan COVID-19, mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi dalam proses revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, serta upaya yang dilakukan BPKAD mengatasi hambatan dalam merevisi APBD tahun 2020. **Metode:** Metode yang digunakan dalam pengamatan ini adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan Pendekatan Induktif. Dengan teknik pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan. Faktor pendukung revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 antara lain anggaran tiap Organisasi Perangkat Daerah yang dikurangi masing-masing sebesar dua puluh persen dari anggaran Organisasi Perangkat Daerah dan kinerja para pegawai yang mulai menetapkan *work form home* serta adanya dukungan dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menangani penyebaran COVID-19. **Kesimpulan:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 adalah anggaran yang digunakan untuk membeli barang habis pakai oleh tenaga kesehatan juga untuk penanganan pasien membutuhkan anggaran yang masih dihitung sangat besar ketimbang anggaran ada dan Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah dari Provinsi juga kurang. Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan 3 kali merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dengan terus mengurangi anggaran kegiatan di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah.

Kata Kunci: Revisi Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan surat keputusan DPRD kabupaten Kepulauan Yapen nomor 180/18 tertanggal 28 Desember 2019 sudah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dengan rincian besaran belanja daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2020 sebesar Rp.1,333 triliun serta pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar Rp.218 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan seperti yang dikatakan ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Yohanes Raubaba ditetapkan sebesar Rp.234,8 miliar sehingga terdapat surplus anggaran daerah sebesar Rp.16 miliar. Sesuai dengan tema pembangunan Tahun Anggaran 2020 menurut Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Toni Tesar maka prioritas pembangunan dalam kerangka kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan untuk urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang mendasar berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan bahwa prioritas program pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 yakni bidang Pendidikan diarahkan untuk peningkatan kualitas Pendidikan dan kebudayaan yang meliputi, validasi data tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan kualitas data pokok pendidikan (Dapodik), memenuhi kebutuhan pengawasan dan pemilik sekolah TK, SD dan SMP. Program lain



pendidikan juga lanjutnya adalah pelatihan peningkatan kompetensi guru sekolah, pengadaan guru kontrak untuk mengisi kekurangan guru di setiap sekolah serta pemerataan untuk setiap kampung akan dibangun satu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Pada awal bulan maret tahun 2020, Presiden Republik Indonesia Ir. Hj. Joko Widodo mendapatkan surat yang berisikan amanat untuk meningkatkan perhatian dalam menanggapi adanya wabah COVID-19 ini. Surat tersebut diamanatkan langsung oleh Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Surat tersebut menjadi sinyal bahwasanya COVID-19 sudah benar-benar memasuki level darurat sehingga harus disampaikan langsung supaya kesadaran dapat ditingkatkan. (news.detik.com diakses 02 september 2021). Berdasarkan hasil prasurvey lewat jalur telepon dengan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Yapen beliau mengatakan bahwa “seiring berjalannya waktu kami rasa anggaran untuk penanganan COVID-19 ternyata membutuhkan biaya yang lumayan besar dan saat terjadi pandemic DAU dan DAK yang diterima oleh kabupaten juga dikurangi pemerintah pusat maka kami putuskan untuk merevisi anggaran dan memotong anggaran setiap OPD sebesar 20% untuk kami serahkan kepada dinas Kesehatan untuk digunakan dalam percepatan penanganan Pandemi COVID-19”.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pemerinta Kabupaten Kepulauan Yapen juga terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan sehingga lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Setiap proyek yang tercantum pada APBD harus dipastikan sumber anggarannya sehingga tidak menimbulkan utang di kemudian hari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2020 pun kemudian harus dirubah atau direvisi terkait dengan munculnya pandemic COVID-19 yang masuk ke Indonesia sekitar bulan maret.. Presiden Republik Indonesia Ir. Hj. Joko Widodo mendapatkan surat yang berisikan amanat untuk meningkatkan perhatian dalam menanggapi adanya wabah COVID-19 ini. Surat tersebut diamanatkan langsung oleh Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Surat tersebut menjadi sinyal bahwasanya COVID-19 sudah benar-benar memasuki level darurat sehingga harus disampaikan langsung supaya kesadaran dapat ditingkatkan. (news.detik.com diakses 02 september 2021). Berdasarkan hasil prasurvey lewat jalur telepon dengan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Yapen beliau mengatakan bahwa “seiring berjalannya waktu kami rasa anggaran untuk penanganan COVID-19 ternyata membutuhkan biaya yang lumayan besar dan saat terjadi pandemic DAU dan DAK yang diterima oleh kabupaten juga dikurangi pemerintah pusat maka kami putuskan untuk merevisi anggaran dan memotong anggaran setiap OPD sebesar 20% untuk kami serahkan kepada dinas Kesehatan untuk digunakan dalam percepatan penanganan Pandemi COVID-19”.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh Nur Afrijaya Trisnawati, Burhanuddin dan Ika Sasti Ferina mengemukakan bahwa rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan presentase yang dicapai sebesar 92% dan termasuk dalam kriteria efektif. Penelitian kedua oleh Muhammad Fauzi Fikri Haikal yang menyatakan ekonomi nasional, pengalihan anggaran dan pembiayaan di masa pandemi Covid 19 untuk lebih menyempurnakan peraturannya. Penelitian yang ketiga oleh Berta Agus Petra, Yosi Puspita Sari yaitu kinerja pemerintah Kota Padang yang harus lebih bagus dari pada Tahun-tahun sebelumnya.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, terlihat ada beberapa kesamaan dengan yang penulis akan teliti yakni metode yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Perbedaannya terletak pada lokus penelitian yakni Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan, Sedangkan lokus penulis terletak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas revisi APBD tahun 2020 dalam percepatan penanganan COVID-19, mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi dalam proses revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, serta upaya yang dilakukan BPKAD mengatasi hambatan dalam merevisi APBD tahun 2020.

### **II. METODE**

Metode yang digunakan dalam pengamatan ini adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan Pendekatan Induktif. Dengan teknik pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan penulis melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD, Kepala Sub Bidang Pengendalian APBD, Staf Bagian Penyusunan dan Pengendalian APBD, dan Ketua Tim Satuan Tugas Penanganan Pandemi Covid-19 Kabupaten Kepulauan Yapen.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengukuran efektifitas revisi APBD yang di bahas oleh penulis menggunakan teori dari Marthin & Lubis yang mengukurnya dalam 3 indikator yaitu sumber anggaran atau dari mana saja pendapatan anggarandaerah yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penulis bandingkan dengan 2 APBD tahun 2019 dan 2018 yang merupakan data pendapatan anggaran daerah sebelum APBD tahun 2020, penggunaan anggaran dimana sejauhmana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan data APBD, dan pencapaian target yang diharapkan di tahun 2020 terutama saat pandemic Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua

#### **3.1 Pendekatan Sumber / Resource Approach (Sumber)**

Sumber pendapatan anggaran Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2020 yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2020 akan penulis jabarkan dalam perbedaan sumber dan jumlah pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020, sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Sumber Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan APBD 2018**

URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	%
	PENYUSUNAN	PERUBAHAN		
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.191.783.840.788,20</b>	<b>1.248.940.493.217,20</b>	<b>57.156.652.429,00</b>	<b>4,80</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>44.008.843.924,20</b>	<b>13.754.493.582,20</b>	<b>(30.254.350.342,00)</b>	<b>(68,75)</b>
Pajak Daerah	5.342.266.883,20	5.410.539.972,20	68.273.089,00	1,28
Retribusi Daerah	1.653.704.022,00	3.742.068.777,00	2.088.364.755,00	126,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37.012.873.019,00	4.601.884.833,00	(32.410.988.186,00)	(87,57)
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>818.320.542.000,00</b>	<b>818.320.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43.821.067.000,00	43.821.067.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	590.680.088.000,00	590.680.088.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	183.819.387.000,00	183.819.387.000,00	0,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>329.454.454.864,00</b>	<b>416.865.457.635,00</b>	<b>87.411.002.771,00</b>	<b>26,53</b>
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.859.947.864,00	18.171.691.132,00	311.743.268,00	1,75
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	281.066.952.000,00	310.013.460.000,00	28.946.508.000,00	10,30
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.527.555.000,00	88.680.306.503,00	58.152.751.503,00	190,49
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.191.783.840.788,20</b>	<b>1.248.940.493.217,20</b>	<b>57.156.652.429,00</b>	<b>4,80</b>

Sumber : Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 41 Tahun 2018

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang sangat mengalami penurunan dan pada periode Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2018 ini Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam pendapatan yang paling sedikit dibanding 5 tahun sebelumnya namun pendapatan anggaran daerah dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus masih cukup tinggi dan pada tahun 2018 ini penggunaan anggaran masih berjalan normal dan hanya 1 kali mengalami revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018

**Gambar 2**  
**Sumber Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan APBD 2019**

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>PENDAPATAN</b>	1.408.847.885.801,07	1.340.824.685.230,36	(68.023.200.570,71)	(4,83)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	41.771.172.937,07	111.971.172.937,07	70.200.000.000,00	168,06
Pendapatan Pajak Daerah	7.605.329.595,20	9.147.434.200,80	1.542.104.605,60	20,28
Hasil Retribusi Daerah	4.616.791.516,00	4.616.791.516,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.549.051.825,87	98.206.947.220,27	68.657.895.394,40	232,35
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	914.702.016.000,00	914.702.016.000,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.636.076.000,00	38.636.076.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	608.602.076.000,00	608.602.076.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	267.463.864.000,00	267.463.864.000,00	0,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	452.374.696.864,00	314.151.496.293,29	(138.223.200.570,71)	(30,56)
Pendapatan Hibah	0,00	38.969.098.000,00	38.969.098.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.859.947.864,00	29.621.230.726,00	11.761.282.862,00	65,85
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	302.820.324.000,00	32.258.636.567,29	(270.561.687.432,71)	(89,35)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	131.694.425.000,00	10.586.400.000,00	(121.108.025.000,00)	(91,96)
Pendapatan Lainnya	0,00	202.716.131.000,00	202.716.131.000,00	0,00

Sumber: Lampiran I Penjabaran Perubahan Nomor 42 Tahun 2019

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 terlihat makin menurun dari yang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 berjumlah sekitar 48 Milyar, pada tahun 2019 turun menjadi 41 Milyar.

Gambar 3  
Sumber Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan APBD 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>PENDAPATAN</b>	1.349.697.225.940,65	1.215.612.623.032,27	(134.084.602.908,38)	(9,93)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	143.213.241.353,36	92.043.740.950,98	(51.169.500.402,38)	(35,73)
Pendapatan Pajak Daerah	7.605.329.594,20	7.605.329.594,20	0,00	0,00
Hasil Retribusi Daerah	4.616.791.515,80	3.616.791.515,80	(1.000.000.000,00)	(21,66)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.991.120.243,36	80.821.619.840,98	(50.169.500.402,38)	(38,30)
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	913.732.826.000,00	819.025.379.835,00	(94.707.446.165,00)	(10,36)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.311.601.000,00	49.724.011.835,00	12.412.410.835,00	33,27
Dana Alokasi Umum	613.084.681.000,00	544.038.318.000,00	(69.046.363.000,00)	(11,26)
Dana Alokasi Khusus	263.336.544.000,00	225.263.050.000,00	(38.073.494.000,00)	(14,46)
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	292.751.158.587,29	304.543.502.246,29	11.792.343.659,00	4,03
Pendapatan Hibah	29.093.200.000,00	29.093.200.000,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.715.866.020,00	21.715.866.020,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.258.636.567,29	32.258.636.567,29	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	14.537.321.659,00	14.537.321.659,00	0,00
Pendapatan Lainnya	209.683.456.000,00	206.938.478.000,00	(2.744.978.000,00)	(1,31)

Sumber : Lampiran I PERBUB Nomor 94 perubahan APBD 2020

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2020 terlihat bahwa pemerintah daerah mulai memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan hasil yang sangat meningkat sekitar 300% dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 namun karena adanya pandemi pemakaian anggaran dari PAD dengan cepat digunakan dikarenakan Dana Alokasi Umum yang langsung di geserpada penanggulangan COVID-19 serta pemberian Dana.

### 3.2 Pendekatan Proses / *Process Approach* (Penggunaan)

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2020 jumlah total Pendapatan anggarandaerah Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sekitar 1.3 Triliun yang dengan terjadinya keadaan darurat maka APBD 2020 ini di revisi dengan rincian belanja dan pemangkasan belanja sesuai ini lampiran IA PERBUB No.94 Tahun 2020 tentang perubahan APBD 2020 adalah sebagai berikut:

Pemangkasan Pada Belanja Pegawai yang dari semula sekitar 438 Milyar menjadi sekitar 380 Milyar.

Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat semula tidak ada menjadi sekitar 17 Milyar yang setelah penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris BPKAD Bantuan Sosial kepada kelompok Masyarakat ini merupakan bantuan dengan wujud pemberian modal usaha



beternak dan budidaya yaitu antara lain Ayam Potong, Ayam Petelur, Ikan Lele, Ikan Nila, dll dengan memberikan modal usaha yang akan dikelola minimal 10 dan maksimal 15 orang.

Uang honor bagi tenaga kesehatan non PNS naik dari sekitar 100 juta menjadi sekitar 2,5 Miliar Khusus untuk uang kerja lembur nonPNS bidang kesehatan.

Seluruh belanja OPD selain OPD yang terkait dengan kesehatan mengalami pemangkasan sebesar 20% dari sebelum revisi atau yang telah di rencanakan pada APBD 2020 yang belum di revisi.

Seluruh kegiatan lapangan OPD dipangkas dari yang telah di tentukan sebelumnya pada APBD 2020 yang belum di revisi.

Banyak belanja modal yang dipangkas secara drastis dan bahkan dihapuskan dari APBD 2020 sebelum revisi.

### **3.3 Pendekatan Sasaran / Goals Approach (Pencapaian target)**

Pengukuran indikator yang kedua dengan mengecek daftar pencapaian sasaran program dari revisi APBD tahun 2020 dengan tujuan percepatan penanganan Pandemi COVID-19 dan mengatasi kebutuhan pokok masyarakat kurang mampu mulai dari sasaran revisi APBD 2020, Laporan perkembangan penyebaran pandemi COVID-19 di KabupatenKepulauan Yapen dan laporan keuangan pasca revisi tahun 2020 dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2020 yang penulis jabarkan sesuai dengan realisasi anggaran tahun 2020, laporan dinas kesehatan terkait belanja barang habis pakai dan peralatan kesehatan untuk penanganan COVID19, serta laporan dinas sosial tentang bantuan pangan non tunai serta bantuan modal bagi kelompok masyarakat

Seluruh belanja barang dan jasa mengalami pemangkasan kecuali belanja perlengkapan dan bahan kesehatan yang semula hanya sekitar 4 Miliar menjadi sekitar 20 Miliar; Belanja kelengkapan kerja tenaga kesehatan semua sekitar 23 Juta menjadi sekitar 50 Juta; Obat-obatan kesehatan dari sekitar 8 Miliar menjadi sekitar 12Miliar; Pengadaan alat-alat kedokteran dan laboratorium naik dengan mengalami penambahan masing-masing sekitar 1.3 Miliar. Pembangunan dan perbaikan fasilitas jalan dan taman di potong habis dari yang telah di rencanakan sebelumnya pada APBD 2020 sebelum revisi.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pada penelitian pertama oleh Nur Afnijaya Trisnawati, Burhanuddin, Ika Sasti Ferina tentang efektivitas Realisasi dan Serapan Anggaran dengan rata rata presentase sebesar 92% termasuk dalam kriteria efektif, pada penelitian ini BPKAD Kepulauan Yapen melakukan revisi anggaran sebanyak 3 kali agar bisa melewati masa masa sulit pandemic Covid-19 meskipun mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Pada penelitian kedua oleh Sopanah, Muhammad Fauzi Fikri haikal tentang refocusing anggaran di masa pandemic Covid-19 untuk menyempurnakan program pemulihan ekonomi nasional, pengalihan anggaran dan pembiayaan Covid, pada penelitian ini refocusing anggaran terjadi dalam 3 tahun berturut turut. Pada penelitian ke tiga oleh Berta Agus Petra, Yosi Puspita Sari tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat diharapkan Kinerja Pemerintah Kota Padang harus lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya, pada penelitian ini Revisi APBD Kepulauan Yapen berdampak baik pada penanganan pandemic Covid-19 sehingga menjadi lebih baik.

#### **IV. KESIMPULAN**

Kabupaten Kepulauan Yapen berhasil melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 walaupun dengan keadaan keuangan yang pengelolaannya masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Berikut ini akan penulis jabarkan kesimpulan dari analisis fokus magang riset terapan pemerintahan. Revisi tahap pertama dilaksanakan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang masuk di Indonesia dan juga dilaksanakan seiring dengan keputusan pemerintah pusat untuk melaksanakan PSBB. Revisi kedua dilaksanakan karena perkembangan pandemi COVID-19 ini masuk di Serui dan mulai mengalami peningkatan pasien positif yang walaupun masih tergolong kenaikan pasien positif yang tidak melonjak namun revisi kedua dilaksanakan untuk menambah kualitas bidang kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Revisi ketiga dilaksanakan karena perintah presiden untuk seluruh komponen pemerintahan melaksanakan pemulihan ekonomi nasional juga karena melonjaknya pasien COVID-19 di Serui sampai 300% lebih dengan 400 lebih pasien positif yang bertambah maka pemerintah merevisi lagi APBD tahun 2020 ini dan pada total pemakaian anggaran tahun 2020 Serui mengalami defisit sekitar 103 Miliar dan ini menjadi tugas bagi pemerintah Serui untuk memulihkan keadaan anggaran daerah pada 2021. Hambatan yang dialami oleh BPKAD dalam merevisi APBD tahun 2020 adalah kebijakan kepala daerah yang selalu berubah-ubah dengan kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat pemulihan infrastruktur yang dipaksakan dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19 ini sedang mengalami kenaikan pasien positif sekitar 400 lebih pasien positif. Upaya yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen hanya terus mengurangi beberapa sektor seperti belanja pegawai dan penghapusan beberapa program kegiatan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** penulis memfokuskan hasil penelitian ini untuk menjelaskan lebih tentang penggunaan anggaran yang digunakan untuk percepatan penanganan pandemi covid 19 khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Harapan penulis bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan jumlah anggaran yang lebih tinggi agar dapat membangun Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi lebih baik selama pandemi ini.

#### **VI. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

#### **VII. DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. 2017. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi 4 Terjemahan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: UI-Press.
- Moleong, L. .. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Simangunsong Fernandes. 2016. *Kapita Selekta Kepegawaian Indonesia*. Bandung: Buku Literatur IPDN.



Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, Nyoman I. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra utama.

Ulber Silalahi. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

